

## Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Tata Kelola Keuangan Kampung Berbasis Transparansi dan Akuntabilitas

Ayu Kurnia Utami<sup>1</sup>, Krismiati<sup>2</sup>, Djamil Hasim<sup>2</sup>, Sri Handayani<sup>4</sup>, Musdalifah Haz<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Administrasi Publik, Ilmu Administrasi, IISIP Yapis, Biak, Papua;

### Abstrak

Tata kelola keuangan kampung menjadi isu krusial dalam pembangunan berbasis lokal. Dalam praktiknya, masih ditemukan lemahnya kapasitas aparatur kampung dalam memahami prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga berisiko pada penyimpangan dana desa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur kampung melalui pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan rencana anggaran, pelaporan, serta publikasi pertanggungjawaban. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, melalui workshop, diskusi kelompok terfokus, dan simulasi. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan aparatur kampung dalam pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Diharapkan kegiatan ini menjadi pemicu perbaikan tata kelola desa yang lebih baik.

**Kata kunci:** Tata kelola, Keuangan kampung, Transparansi, Akuntabilitas, Aparatur desa

### Abstract

Village financial governance is a crucial issue in local-based development. In practice, there is a lack of capacity among village officials in understanding transparency and accountability principles, which can lead to fund misuse. This community service activity aims to improve the capacity of village officials through training and mentoring in budget planning, reporting, and accountability publication. The method used is a participatory approach, including workshops, focus group discussions, and simulations. The results showed an increase in knowledge and skills of village officials in managing finances transparently and accountably. This activity is expected to trigger better village governance improvements.

**Keywords:** Governance, Village finance, Transparency, Accountability, Village apparatus

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan kampung yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kampung

memperoleh kewenangan yang besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, termasuk mengelola dana yang cukup signifikan melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun demikian, besarnya anggaran yang diterima tidak selalu diimbangi dengan kemampuan aparatur

kampung dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Di berbagai kampung, khususnya di wilayah Kabupaten Biak Numfor, masih ditemukan lemahnya sistem pengelolaan keuangan desa yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas dan kompetensi aparatur dalam menyusun rencana anggaran, melaksanakan kegiatan sesuai RAB, serta menyusun laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu dan sesuai prosedur. Permasalahan ini diperparah dengan minimnya akses terhadap informasi, belum optimalnya pendampingan dari pihak terkait, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi aparatur kampung adalah lemahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar tata kelola keuangan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Transparansi dalam pengelolaan anggaran masih bersifat formalitas, sementara akuntabilitas seringkali tidak dilaksanakan dengan standar yang jelas dan terdokumentasi. Hal ini menjadi celah terjadinya penyimpangan penggunaan dana dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran kampung.

Berbagai penelitian dan praktik pengabdian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan terhadap aparatur kampung dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam tata kelola keuangan. Misalnya, kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi mampu membekali aparatur kampung dengan pengetahuan praktis dan pemahaman regulatif dalam pengelolaan keuangan kampung yang baik (Safitry & Rahmatullah, 2024).

Melihat urgensi dan kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur kampung melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Fokus utama pengabdian ini adalah memberikan pelatihan dan pendampingan terkait siklus keuangan kampung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, dengan menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam

kompetensi teknis dan sikap profesional aparatur kampung, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan kampung serta pembangunan yang lebih partisipatif dan berkeadilan..

## METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*) yang melibatkan secara aktif aparatur kampung sebagai subjek utama dalam kegiatan. Tahapan kegiatan terdiri dari:

1. Observasi awal, untuk mengidentifikasi permasalahan spesifik dalam tata kelola keuangan kampung.
2. Workshop pelatihan, tentang prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, siklus APBKampung, serta teknik pelaporan.
3. Simulasi dan praktik langsung, penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBKamp) dan laporan pertanggungjawaban.
4. Evaluasi, melalui pre-test dan post-test serta umpan balik dari peserta.

Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari Kabupaten Biak Numfor, melibatkan 20 orang aparatur kampung terdiri dari kepala kampung, sekretaris, bendahara, dan kepala urusan..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor, dengan melibatkan 20 orang aparatur kampung yang terdiri atas Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Bendahara, Kepala Urusan, dan Ketua RT/RW. Pelaksanaan kegiatan terbagi dalam tiga tahapan utama, yaitu: pelatihan teori dan regulasi, simulasi penyusunan dokumen keuangan kampung, dan pendampingan langsung dalam pelaporan serta publikasi data anggaran kepada masyarakat.

Sebelum kegiatan pelatihan dimulai, dilakukan pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan kampung. Hasil pre-test menunjukkan bahwa mayoritas aparatur kampung (70%) masih mengalami kesulitan

dalam memahami alur penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBKamp), serta belum memahami secara utuh pentingnya dokumen pertanggungjawaban dan transparansi kepada publik.

Selama sesi pelatihan, peserta diberikan pemahaman terkait regulasi terbaru, khususnya Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta praktik penyusunan dokumen menggunakan format baku yang direkomendasikan oleh inspektorat daerah. Para peserta juga diajak melakukan simulasi penyusunan RAPBKamp, laporan realisasi anggaran, serta dokumen pertanggungjawaban. Pendekatan simulatif ini terbukti efektif dalam membantu peserta memahami tahapan teknis dan alur dokumentasi secara menyeluruh.

Setelah pelatihan, dilakukan post-test sebagai bentuk evaluasi peningkatan pemahaman. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan, di mana 85% peserta mampu menyusun dokumen keuangan sederhana secara mandiri dan memahami kewajiban publikasi dokumen anggaran kepada masyarakat.

Diskusi kelompok terfokus (FGD) juga digelar untuk menggali kendala dan harapan dari para aparatur kampung. Dalam FGD tersebut, peserta mengungkapkan bahwa selama ini mereka kesulitan mengakses pelatihan atau pendampingan dari pihak eksternal, sehingga banyak kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan aturan baku. Dengan adanya kegiatan ini, para aparatur merasa lebih percaya diri dan memiliki acuan yang jelas dalam bekerja.

Salah satu peserta, sekretaris kampung, menyampaikan:

*"Selama ini kami bingung harus mulai dari mana untuk menyusun RAPBKamp dan laporan keuangan. Baru sekarang kami paham alurnya dan tahu dokumen apa saja yang wajib disusun. Kegiatan ini sangat membantu kami."*

Selain peningkatan pemahaman teknis, kegiatan ini juga berhasil menanamkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kampung. Hal ini ditunjukkan dengan kesediaan aparatur kampung membuat papan informasi anggaran dan rencana kegiatan tahunan kampung yang

dipasang di balai kampung untuk diketahui masyarakat luas.

Berdasarkan evaluasi akhir, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan edukatif yang diterapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur kampung. Hal ini menguatkan temuan dalam penelitian sebelumnya (Safitry & Rahmatullah, 2024) bahwa keberhasilan tata kelola keuangan kampung sangat bergantung pada kompetensi SDM yang memadai, serta dukungan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis aparatur, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan kapasitas aparatur kampung dalam memahami dan menerapkan prinsip tata kelola keuangan kampung yang baik, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Melalui pendekatan partisipatif berupa pelatihan, simulasi, dan pendampingan, para aparatur kampung mampu meningkatkan pemahaman terhadap regulasi keuangan, menyusun dokumen anggaran dan pelaporan secara sistematis, serta memiliki kesadaran untuk membuka akses informasi anggaran kepada masyarakat. Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari hasil evaluasi tertulis, tetapi juga dari komitmen peserta dalam menerapkan praktik transparansi keuangan secara nyata di kampung. Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui pendidikan dan pendampingan yang berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola kampung yang bersih, partisipatif, dan bertanggung jawab.

## **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM IISIP Yapis Biak atas dukungan

finansial dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, serta kepada pemerintah Kampung yang telah menjadi mitra pelaksana.

## **Daftar Pustaka**

- Bappenas. (2017). Kajian Evaluatif Tata Kelola Dana Desa dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Desa. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Dwiyanto, A. (2018). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kemendagri.
- Kurniawan, T. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(1), 23–35.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, R. (2014). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Prabowo, T. J. W. (2021). Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(2), 55–64.
- Sulistiyani, A. M., & Rosidah. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.